

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan penelitian ini bersifat *cross sectional* yang artinya penelitian ini dilakukan dalam satu waktu tertentu. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran atau mendeskripsikan seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan pengalihan PBB-P2 di Kota Metro. Selain itu, peneliti juga akan menjelaskan baik tentang kendala selama persiapan maupun selama pelaksanaan kebijakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

B. Sumber Data

Untuk mendukung penjelasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menghimpun informasi yang meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer dalam penelitian berasal dari Dinas Pendapatan Kota Metro, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro.

Tabel 5. Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Syamsul Yulianto	Kepala Sub Bagian Umum	KP3 Metro
2	Asnawi	Kepala Seksi Ekstensifikasi	KP3 Metro
3	Eka Wahyudi	Account Representative	KP3 Metro
4	Ida Sriyatun	Sekretaris	Dispenda Metro
5	Mirza Marta	Penelitian dan Pengembangan	Dispenda Metro

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dari berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro, antara lain :

1. Data penerimaan PBB P-2 Kota Metro selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2009 s.d 2013
2. Proporsi pendapatan PBB P-2 dalam APBD Kota Metro
3. Data rincian APBD Kota Metro selama lima tahun terakhir yaitu 2009 s.d 2013.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari kenyataan – kenyataan dan praktik di lapangan. Data – data tersebut diperoleh melalui dua teknik yaitu :

1) Wawancara

Berupa tanya jawab antara peneliti dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan, guna mencapai data yang jelas sehingga peneliti lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara. Wawancara tersebut dilakukan dengan melakukan sampling terhadap tiga elemen yang mewakili yaitu dari Dinas Pendapatan Kota Metro, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro.

Tabel 6. Data Pelaksanaan Wawancara

No	Nama	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan *)
1	Syamsul Yulianto	KP3 Metro	19 Mei 2014
2	Asnawi	KP3 Metro	21 Mei 2014
3	Eka Wahyudi	KP3 Metro	26 Mei 2014
4	Ida Sriyatun	Dispenda	30 Mei 2014
5	Mirza Marta	Dispenda	27 Mei 2014

*) Tanggal pelaksanaan dapat berubah menyesuaikan jadwal narasumber

2) Dokumentasi dan studi literatur

Berupa pengumpulan data yang berasal dari Dinas Pendapatan Kota Metro, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro, serta literatur atau informasi yang masih relevan dengan penelitian ini baik yang berasal dari buku, dokumen maupun internet. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat mendukung dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian ini bersifat deskriptif, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara mengumpulkan sejumlah data serta informasi yang dijumpai di lapangan dan kemudian akan dianalisis dengan cara memaparkan hasil penelitian melalui kata-kata.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2012:337), bahwa aktivitas dalam analisis data pada penelitian deskriptif kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan atau data di lapangan dituangkan dalam

uraian lengkap dan terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan. Dalam penelitian ini, reduksi data yang dilakukan peneliti yaitu memilah-milah data hasil wawancara, dan dokumentasi mana yang penting untuk digunakan dan mana yang tidak perlu digunakan sesuai dengan ruang lingkup penelitian sebelumnya yaitu dampak penerimaan PBB P2 sebelum dan setelah pengalihan dan implementasi kebijakan PBB-P2. Oleh karena itu, peneliti melakukan reduksi data dari informasi yang telah didapat kemudian dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dan foto atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal peneliti memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam

kesimpulan yang tentatif. Data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan dan diketahui gejalanya kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Kebijakan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Metro.

E . Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Metro

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang peresmiannya dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: 10 Bagian Sekretariat Daerah, 4 Badan dan 2 Kantor. Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kota Metro memiliki luas wilayah 6.874 ha, terdiri dari 5 Kecamatan dengan 22 kelurahan, yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000. Kecamatan dengan luas paling besar adalah Kecamatan Metro Utara dengan Luas 1.964 Ha atau meliputi 29 % total luas Kota Metro. Sementara kecamatan lainnya memiliki luas

yang relatif merata antara 17 % sampai dengan 21 % terhadap luas seluruh kota. Kondisi ini menggambarkan adanya proporsi yang tidak terlalu jauh berbeda di tiap kecamatan, berkaitan dengan luas wilayahnya yang dapat diisi dengan penyebaran penduduk yang merata juga untuk memperoleh tingkat kepadatan yang merata dan rencana distribusi alokasi sumber daya yang seimbang di tiap wilayah.

Tabel 7. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kota Metro

Daerah sampel	Luas wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2010	2011	2012	2013	2014
Kota Metro	68,74	145.471,00	147.050,00	149.358,69	151.703,62	154.085,36

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Dari data luas wilayah dan jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai dengan 2014 pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk di Kota Metro semakin meningkat dengan rata-rata peningkatan 1,57 % setiap tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk Kota Metro adalah 2.173 jiwa setiap 1 km² dengan rata-rata 4 jiwa per rumah tangga.

Banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah dianggap berpengaruh positif pada permintaan tanah dan bangunan. Sehingga, semakin tinggi pertumbuhan jumlah penduduk di suatu daerah, maka diperkirakan permintaan akan tanah dan bangunan di daerah tersebut juga akan meningkat. Pada akhirnya permintaan yang meningkat tersebut akan mendorong meningkatnya transaksi tanah dan bangunan, yang berarti mendorong penerimaan PBB-P2.

2. Kondisi Geografis.

1.1 Letak dan Posisi Kota Metro

Posisi geografis Kota Metro secara administratif terbagi dalam 5 (lima) wilayah kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan dengan total luas wilayah 68,74 km² atau 6.874 ha. Kota Metro memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.
3. Sebelah Timur : Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
4. Sebelah Barat : Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Kota Metro terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Metro Pusat, Metro Utara, Metro Barat, Metro Timur dan Metro Selatan seluas 68,74 km² dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 118.448 jiwa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Metro Utara (19,64 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Metro Barat (11,28 km²).

3. Arah Kebijakan Umum

Kota Metro memiliki beberapa kebijakan umum untuk mewujudkan visi dan misi serta menentukan tujuan pengembangan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Bidang Pendidikan
 - a. Terwujudnya kualitas SDM di masyarakat melalui jenjang pendidikan formal dan non formal
 - b. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan

2. Kebijakan Umum Bidang Kependudukan
 - a. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyematan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - b. Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja guna mempersiapkan tenaga kerja yang profesional, handal dan siap kerja

3. Kebijakan Umum Bidang Perkotaan
 - a. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta penanganan dampak bencana alam
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan dan penataan ruang kota
 - c. Meningkatkan mutu hasil penelitian dan pendataan guna menunjang perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah.

4. Kebijakan Umum Bidang Perekonomian Daerah
 - a. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang didukung oleh pembangunan industri, peningkatan pemanfaatan dan penguasaan teknologi.

- b. Meningkatkan kemampuan dan produktifitas usaha melalui optimalisasi sumberdaya pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain.
- c. Mengembangkan pertanian dengan wawasan bisnis, menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembagunan pertanian.
- d. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan dan perkoperasian.
- e. Pengembangan iklim investasi pembukaan penanaman modal dan pengembangan perusahaan daerah.

5. Kebijakan Umum Bidang Kualitas Aparatur

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaran administrasi negara melalui penataan kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur.

6. Kebijakan Umum Bidang Otonomi Daerah

- a. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupn masyarakat

4. Keuangan Daerah

1. Rasio Pajak Daerah

Rasio pajak daerah merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto suatu wilayah dalam setahun. Rasio pajak dapat

digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mengukur kinerja perpajakan dan melihat potensi yang dimiliki.

Selama 5 tahun terakhir, rasio pajak Kota Metro berada pada kisaran 0,3 %, hal ini dapat menunjukkan penerimaan pajak daerah yang relatif rendah.

Pada tahun 2009 rasio pajak Kota Metro menunjukkan nilai tertinggi sebesar 0,36 %. Besaran pajak provinsi Lampung sebesar 3 (tiga) kali lipat pajak yang diperoleh Kota Metro selama 5 tahun terakhir. Rasio pajak tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 1,05 %. Pada tahun 2011 rasio pajak provinsi Lampung sebesar 0,93 %.

Tabel 8. Rasio Pajak Kota Metro dan Provinsi Lampung 2008-2012 dalam persen (%)

Lokasi	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rasio Pajak Metro	0,29	0,36	0,28	0,47	0,46
Rasio Pajak Lampung	1,05	0,82	0,88	0,93	***

Sumber: BPS Kota Metro, 2013

2. Pertumbuhan PAD

Kinerja keuangan daerah dapat juga dijelaskan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumber asli daerahnya dan mampu menggali potensi sumber-sumber PAD dari daerahnya sendiri. Demikian otonomi daerah akan mendukung aspek kemandirian

dalam bidang keuangan yang diukur dengan derajat otonomi fiskal daerahnya.

Pertumbuhan PAD Kota Metro pada periode 2008-2011 menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Pada tahun 2011 pertumbuhan PAD Metro mencapai angka sebesar 53,6 %. Angka ini merupakan yang tertinggi selama periode pengamatan. Pada tahun 2012 diperkirakan pertumbuhan PAD mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 22,63%.

Tabel 9. Pertumbuhan PAD Kota Metro dan Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 dalam persen (%)

Lokasi	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan PAD Metro	2,99	5,41	29,84	53,60	22,63
Pertumbuhan PAD Lampung	32,18	3,52	29,99	24,80	***

Sumber : BPS Kota Metro,2013

Data tersebut tentunya menunjukkan adanya peningkatan PAD diseluruh Indonesia dalam era otonomi daerah khususnya sumber-sumber penerimaan asli daerah. Meningkatnya PAD ini disebabkan oleh penerimaan pajak yang meningkat dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini tentunya mengidentifikasi adanya keseriusan pemerintah daerah untuk menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerahnya.

6. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Metro

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Metro

a. Tugas Pokok

Dinas Pendapatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah. Selain itu Dinas Pendapatan Daerah juga memiliki tugas untuk merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelolah serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
2. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lainnya;
4. Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;

5. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
6. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
7. Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
8. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
9. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional;
10. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
11. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan

Visi Dinas Pendapatan yaitu :

Pengelolaan pendapatan daerah yang profesional dan bertanggung jawab

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas maksimum kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang efektif.
- 2) Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya dan teknologi secara efisien, efektif serta berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 3) Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam menciptakan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

3. Program Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan memiliki beberapa Program Kerja, yaitu sebagai berikut :

1. Program peningkatan sadar pajak

Kegiatan :

- a. Pembinaan/penyuluhan pajak daerah
- b. Sosialisasi Pembinaan tentang penerimaan PPh Pasal 21 terhadap WP PPh UPDN dan PPh Pasal 21
- c. Sosialisasi PBB dan PBB-P2
- d. Himbauan Pajak Daerah
- e. Himbauan Bulan Penagihan PBB
- f. Monitoring penggunaan karcis pajak hiburan dan tontonan
- g. Pembinaan terhadap Warung Makan kaki Lima dan sejenisnya

2. Program peningkatan data objek pajak

Kegiatan :

- a. Sampling kemutakhiran data dan perhitungan potensi pajak daerah
 - b. Pemutakhiran data PPJ Non PLN
 - c. Pemutakhiran data dan pengembangan data PBB
 - d. Monitoring dan validasi data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta bagi hasil pajak daerah provinsi
 - e. Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak
Pengelolaan sistem teknologi informasi pajak
3. Program peningkatan penerimaan pajak

Kegiatan :

- a. Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Daerah.
- b. Penagihan pro aktif pajak daerah
- c. Penagihan Pajak Daerah
- d. Penagihan Pajak secara aktif terhadap tunggakan
- e. Penagihan Pajak Daerah pada UPTD 16 Kecamatan
- f. Penyelesaian berkas permohonan WP yang mengajukan keberatan / keringanan / pengurangan ketetapan pajak
- g. Kawasan tertib pajak
- h. Restoran tertib dan sadar pajak
- i. Verifikasi Pajak bukti-bukti pembayaran Pajak Daerah bila ditemui hal-hal kurang wajar
- j. Penutupan penagihan dan pencanangan PBB Pekan Panutan
PBB
- k. Penagihan tunggakan dan penegakan sanksi hukum pajak

- l. Pemeriksaan Pajak Daerah
- m. Penata usahaan penagihan dan penerimaan PBB
- n. Penyediaan sistem pembayaran secara on line
- o. Penyusunan laporan realisasi penerimaan daerah
- p. Pengelolaan dan penata usahaan keuangan daerah
- q. Penagihan Pajak Daerah berdasarkan ketetapan bulan berjalan
- r. Penagihan Pajak Daerah secara aktif khusus tunggakan, penutupan dan penyegelan objek pajak yang menunggak
- s. Penyampaian SPPT PBB
- t. Pengembangan objek Pajak Parkir.

4. Program pengembangan pajak daerah

Kegiatan :

- a. Pengembangan objek pajak daerah
- b. Penelitian potensi sumber-sumber pendapatan daerah
- c. Melakukan kajian kelayakan Perda-Perda tentang pajak daerah
- d. Pelatihan di bidang perpajakan dan peraturan – peraturan baru